



RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi Tahun 2025. Rencana Kerja ini suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi Tahun 2025. Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi Tahun 2025 ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang baik oleh Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan selama 1 (satu) tahun ke depan, Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021–2026, dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi Tahun 2021–2026.

Materi utama dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi Tahun 2025 ini adalah berisi deskripsi bagaimana capaian kinerja yang hendak diwujudkan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi pada tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategik yang telah ditetapkan. Melalui instrumen ini diharapkan dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam membangun pemerintahan yang baik dan terpercaya berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

Mengamati pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025 disamping mengoptimalkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 terdiri dari pendahuluan, evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian rencana strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi, dan dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif dan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Rencana Kerja (renja) sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat daerah Kecamatan Sebawi Tahun Anggaran 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rencana kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami mengharapkan dokumen rencana kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi tahun 2025.

Sebawi, Desember 2024

CAMAT SEBAWI



SAMIRI, S.Pd., M.Pd.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680320 198902 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	17
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renstra PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	17
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	45
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	45
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	48
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	64
BAB V PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

	Hal
1. Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	17
2. Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi	21
3. Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	27
4. Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025	39
5. Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	55
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi Tahun 2025	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renja perangkat daerah diawali dengan melakukan persiapan penyusunan Renja, meliputi penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja perangkat daerah, penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Selanjutnya dilakukan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Sebawi Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Sebawi 2021-2026, dan RKPD Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Renja Kecamatan Sebawi 2025. Proses penyusunan Renja Kecamatan Sebawi terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu untuk menjembatani perencanaan tingkat perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja disusun oleh masing-masing perangkat daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang akan ditetapkan

menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten serta sebagai dasar pengusulan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi maupun APBN.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi Tahun 2025 merupakan bagian dari RKPD Kabupaten Sambas dan berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dari seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi. Renja Perangkat Daerah disusun untuk memberikan informasi data bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan bagi perangkat daerah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan evaluasi kinerja perangkat daerah. Renja diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tahun mendatang akan makin mendekat pada ke tataran *clean government* dan *good governance*.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program kegiatan, dan sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Berkaitan adanya program pada RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021–2026 dan nomenklatur dalam penyusunan anggaran maka perlu adanya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sebawi Tahun 2025. Dengan dilandasi oleh semangat otonomi daerah di mana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Ayat 1, pemberian kewenangan kepala daerah kepada camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah

mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan daerah dengan perencanaan kecamatan, maka perencanaan tujuan kecamatan mendukung perencanaan pembangunan daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai pemerintah kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sebawi Tahun 2025 yang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, Proses penyusunannya, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan politik, dimana dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, maka program–program yang ditawarkan oleh kandidat kepala daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan *top–down* (atas–bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program–program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan *bottom–up* (bawah–atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stakeholder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan.

Pendekatan *top–down* dan *bottom–up* diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Pada tahapan penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan Ranwal Renja berpedoman

pada Renstra. Hal ini untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Ranwal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sebawi Tahun 2025 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran.

Penyusunan Ranwal Renja juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan. Hal ini untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam Ranwal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra. Penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu. Ranwal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah. Penyempurnaan Ranwal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Ranwal RKPD. Rumusan sub kegiatan alternatif dan atau sub kegiatan baru diajukan Kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah yang merupakan proses penyempurnaan Ranwal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota disampaikan kepada kepala Bappeda Kabupaten/Kota paling lambat minggu ketiga bulan Maret, untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Ranwal RKPD menjadi Rancangan RKPD.

Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja Perangkat Daerah. Verifikasi harus dapat menjamin Rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan Ranwal RKPD. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan

Rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda. Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 minggu setelah penyampaian Rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda.

Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda paling lambat 2 minggu setelah Surat Edaran Kepala Daerah. Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah.

Tahapan perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Hal ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif perangkat daerah berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Tahapan terakhir penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah proses penetapan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi, paling lambat 1 minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Perkada tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.

Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah kepada perangkat daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi Bappeda, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renja

Gambar 1. 1

[illegible]

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 adalah :

- 6

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 8 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi 9 Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 66);
21. Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita 10 Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sambas Nomor 55);
22. Peraturan Bupati Sambas Nomor 105 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 105).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Sebawi dimaksudkan sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sambas dan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan kepala daerah untuk mencapai program/kegiatan/sub kegiatan, kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas;
2. menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya. Dan juga untuk menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, bersih, bertanggung jawab bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta berdaya guna dan berhasil guna untuk tujuan keberhasilan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

3. Untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam perangkat daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.
4. Menjadi panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi Tahun 2025.

Adapun tujuan dari Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk merencanakan program pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran-sasaran strategis selama tahun 2025 yang sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2025 dalam mencapai tujuan dengan implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
2. Sebagai dokumen perencanaan untuk mengakomodasi semua sasaran yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi tahun 2025;
3. Menjadi acuan bagi Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025;
4. Memberikan informasi deskripsi kondisi riil Kecamatan Sebawi beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Kecamatan Sebawi;
5. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi dalam menilai implementasi program, kegiatan serta sub kegiatan operasional Tahun 2025;
6. Merumuskan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sebawi Tahun 2025;

7. Untuk memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025; dan
8. Memberikan pedoman dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan tahun 2025 sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi dengan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan bupati/daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SEBAWI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi.

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang disajikan adalah Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi s/d Tahun Berjalan Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program, kegiatan dan sub kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31:

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Misal:

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - Pencapaian SDGs,
 - Pengentasan kemiskinan,
 - Pencapaian NSPK dan SPM,
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - Pengembangan daerah terisolir,
 - Dsb.
- a. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
- Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- b. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- c. Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN SEBAWI

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tabel T-C.29.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 KABUPATEN SAMBAS

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.805.851.951,00	1.633.697.659,00	90,47%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.060.808,00	10.060.808,00	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.515.202,00	2.515.202,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.515.202,00	2.515.202,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.515.202,00	2.515.202,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.515.202,00	2.515.202,00	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.252.398.349,00	1.221.577.164,00	97,54%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.217.487.945,00	1.187.266.760,00	97,52%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.880.000,00	29.280.000,00	97,99%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.515.202,00	2.515.202,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.515.202,00	2.515.202,00	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.511.808,00	191.013.790,00	76,25%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.496.600,00	17.514.178,00	94,69%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.664.650,00	16.664.650,00	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.992.068,00	31.153.790,00	77,90%

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.354.490,00	49.004.102,00	72,76%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.004.000,00	76.677.070,00	70,99%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126.360.000,00	78.536.000,00	62,15%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.680.000,00	63.870.000,00	57,71%
Pengadaan Mebel	15.680.000,00	14.666.000,00	93,53%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.940.986,00	84.020.897,00	95,54%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.753.950,00	1.749.000,00	99,72%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.152.700,00	15.103.161,00	83,20%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.034.336,00	67.168.736,00	98,73%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.580.000,00	48.489.000,00	61,71%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.450.000,00	30.493.000,00	75,38%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730.000,00	730.000,00	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.400.000,00	17.266.000,00	46,17%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.302.960,00	39.894.176,00	88,06%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.019.300,00	10.019.300,00	100,00%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.019.300,00	10.019.300,00	100,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.400.000,00	1.920.000,00	80,00%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.400.000,00	1.920.000,00	80,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	32.883.660,00	27.954.876,00	85,01%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	32.883.660,00	27.954.876,00	85,01%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	78.712.756,00	62.505.871,00	79,41%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	68.693.456,00	52.486.571,00	76,41%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	8.644.553,00	8.644.553,00	100,00%

Pembangunan di Desa			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.048.903,00	43.842.018,00	73,01%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.019.300,00	10.019.300,00	100,00%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10.019.300,00	10.019.300,00	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.087.783,00	0,00	0,00%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.087.783,00	0,00	0,00%
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15.087.783,00	0,00	0,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.900.208,00	14.900.208,00	100,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.900.208,00	14.900.208,00	100,00%
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14.900.208,00	14.900.208,00	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.630.490,00	28.630.490,00	100,00%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.630.490,00	28.630.490,00	100,00%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.315.245,00	14.315.245,00	100,00%
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14.315.245,00	14.315.245,00	100,00%
JUMLAH	1.988.486.148,00	1.779.628.404,00	89,50%

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Sebawi selama tahun sebelumnya dan perkiraan target tahun 2025. Oleh karena Renstra Perangkat Daerah untuk tahun pertama yakni tahun 2025 belum terlaksana, maka belum ada realisasi target kinerja hasil program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah hanya menggambarkan perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah pada tahun pertama yakni tahun 2025.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Sebawi dan merupakan perangkat daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat di Kecamatan Sebawi. Artinya bahwa tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah peningkatan pelayanan kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Sebawi, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi surat menyurat, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas. Dengan demikian, Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi menangani pelayanan masyarakat di Kecamatan Sebawi mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum. Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016–2021.

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan/sub kegiatan yang hendak

atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan/sub kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi SKPD.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi dapat dilihat sebagaimana Tabel T.C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SEBAWI KABUPATEN SAMBAS

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Proyeksi					Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sebawi			84	87	87,50	88	89	84	87	87,50	88	89	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kedudukan Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Sebawi adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Sambas.

Upaya yang akan dilakukan oleh Kecamatan Sebawi dalam penataan tugas fungsi adalah :

1. Penyempurnaan tugas pokok dan fungsi SOPD Kecamatan Sebawi agar tidak kontradiktif pada pelaksanaan tugas, terutama dalam pemberian pelayanan perizinan;

2. Penegasan dan penguatan fungsi Kecamatan Sebawi sebagai fungsi pelayanan publik; dan
3. Penguatan sistem penilaian kinerja di Kecamatan Sebawi yang melibatkan Camat dalam memberikan rekomendasi penilaian kinerja.

Untuk penguatan unit kerja yang akan menangani pelayanan publik, Kecamatan Sebawi akan melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Dengan pelimpahan kewenangan akan memperpendek jalur birokrasi sehingga Pelayanan Publik akan semakin baik, cepat dan tidak berbelit – belit. Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarannya seharusnya diberikan pelatihan/ bimtek untuk staf Kecamatan Sebawi, serta menyediakan peralatan kerja yang memadai seperti perangkat komputer dan jaringan internet untuk mendukung kelancaran pelayanan di lingkungan Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas.

Dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Hal ini di nilai penting karena Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi pada unit kerja Kecamatan Sebawi.

Dengan adanya SOP, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau sekalipun terjadi penyimpangan di lingkungan pemerintahan. Hal tersebut dapat ditemukan penyebabnya dan bisa diselesaikan dengan cara yang tepat, maka secara bertahap kualitas pelayanan publik akan lebih profesional, cepat dan mudah.

Tujuan dari penyusunan dokumen SOP antara lain :

1. Memberikan pedoman bagi Kecamatan Sebawi dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakannya;
2. Menciptakan komitmen mengenai Prosedur yang dikerjakan oleh Satuan Unit Kerja Kecamatan Sebawi dalam mewujudkan *Good Governance*. *Output* dari kegiatan ini adalah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mampu membangun hubungan dan tata kerja Kecamatan Sebawi serta Pelayanan Publik secara profesional, efektif, serta efisien; dan
3. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan

Administrasi Pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Budaya kerja (*culture-set*) birokrat sepenuhnya harus mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif dan profesional selain itu birokrat belum benar – benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang baik dan belum berorientasi pada hasil (*outcomes*). Reformasi Birokrasi diharapkan akan menjadi pendorong perubahan untuk membawa Kecamatan Sebawi bergeser atau bergerak dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diharapkan.

Pemerintah Kabupaten Sambas telah membuat konsep Budaya Kerja dengan istilah “**SIGAP**” yang dijabarkan sebagai berikut :

❖ **SEMANGAT :**

1. Melakukan pekerjaan dengan senang hati
2. Bekerja dengan motivasi tinggi
3. Bekerja pantang menyerah
4. Responsif terhadap pekerjaan
5. Menumbuhkan inovasi kerja

❖ **INTEGRASI :**

1. Bekerja dengan berpegang teguh pada ajaran agama, etika, dan nilai – nilai organisasi yang berlaku
2. Disiplin, konsisten, jujur, dan dapat dipercaya
3. Bekerja secara objektif
4. Berpikiran positif, aktif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi
5. Menjadi teladan dan panutan bagi orang lain

❖ **GOTONG ROYONG :**

1. Berkolaborasi dengan rekan kerja
2. Memiliki solidaritas yang tinggi
3. Berorientasi pada kepentingan umum

❖ **AKUNTABEL :**

1. Mampu mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
2. Menjaga kewibawaan dan nama baik
3. Mengoptimalkan kinerja dengan prinsip tata kelola yang bersih

❖ **PROFESIONAL :**

1. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi
2. Memegang teguh kode etik profesi
3. Memiliki tanggung jawab profesi
4. Memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat

Berdasarkan konsep Budaya Kerja “**SIGAP**” yang sudah dipublikasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas, maka Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas membuat konsep Budaya Kerja “**HEBAT**” yakni Harmonis, Etos Kerja, Berprestasi, Akselerasi, dan Terukur. Kecamatan Sebawi menargetkan indikator Budaya Kerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan;
2. Pelayanan prima kepada masyarakat;
3. Meningkatkan KAMTIBMAS;
4. Pengelolaan Kepegawaian, Aset, dan Keuangan;
5. Penataan lingkungan bersih dan produktif;
6. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
7. Meningkatkan kinerja Pemerinta Desa;
8. Meningkatkan kesehatan masyarakat;
9. Meningkatkan kualitas pendidikan; dan
10. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari

RPJMD yang memuat, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Sebawi berdasarkan RKPD Kabupaten Sambas sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Sambas yang melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Sebawi.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas Tahun 2025 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Rancangan awal RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan perangkat daerah dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dengan prosedur *bottom-up*. Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat umum.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Kecamatan Sebawi dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Sambas “Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan” adalah letak geografis Kecamatan Sebawi yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Sambas termasuk wilayah pengembangan lingkaran luar Kabupaten Sambas sehingga pertumbuhan Kabupaten Sambas mengarah ke Kecamatan Sebawi baik dari sisi ekonomi, pertanian/perkebunan, perikanan, jasa dan pariwisata.

Kecamatan Sebawi merupakan salah satu perangkat daerah yang berperan strategis dalam konstelasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah Kabupaten Sambas. Pembangunan Kabupaten Sambas dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan di Kecamatan Sebawi juga mengalami perubahan yang nyata. Akselerasi transformasi sosial, ekonomi, dan politik di Kecamatan Sebawi akan menjadi suatu hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan Kabupaten Sambas.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Sebawi untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kerukunan dan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di masyarakat, dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial, ekonomi, dan politik di Kecamatan Sebawi membutuhkan sinergitas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, semua organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang ada. Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakala menilai bahwa alokasi anggaran untuk Kecamatan Sebawi sangat minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya. Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level Pemerintah Kabupaten Sambas untuk melihat Kecamatan Sebawi secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD sebagai berikut:

1. Karena Pandemi Covid-19 masih tetap berlanjut tahun 2025, maka aktivitas Bimbingan Teknis di luar Kabupaten Sambas dipangkas anggarannya sesuai hasil evaluasi tahun sebelumnya;
2. Adanya prioritas peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan, maka anggaran difokuskan pada kegiatan pelayanan publik dan unsur penunjang lainnya untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya;
3. Adanya prioritas peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan aktivitas PKK Desa dan penanggulangan dampak Covid-19 dalam rangka peningkatan hidup sehat dan perekonomian masyarakat.

Untuk lebih jelasnya mengenai review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dapat dilihat Tabel T-C.31.

TABEL T-C.31.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN SAMBAS

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sebawi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	1.882.315.472	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sebawi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	1.920.276.500	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sebawi	Cakupan ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	12.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sebawi	Cakupan ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10.261.444	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sebawi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sebawi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.565.361	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Sebawi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Sebawi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.565.361	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Sebawi	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Sebawi	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.565.361	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.565.361	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sebawi	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	1.377.430.299	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sebawi	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	1.414.709.362	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sebawi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1.341.430.299	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sebawi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1.380.298.635	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Sebawi	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	30.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Sebawi	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	29.280.000	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.565.361	

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat Sebawi 2025

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.565.361	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sebawi	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	49.999.994	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sebawi	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	-	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sebawi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	20.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sebawi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Sebawi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Sebawi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	-	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sebawi	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	190.885.179	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sebawi	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	231.331.840	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sebawi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	12.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sebawi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	18.999.806	
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sebawi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	12.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sebawi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	17.340.701	
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sebawi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	40.885.173	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sebawi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	41.989.900	
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Sebawi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	24.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Sebawi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	38.339.422	
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Sebawi	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Sebawi	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	-	

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat Sebawi 2025

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	114.662.000	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sebawi	Cakupan pelayanan barang milik daerah	100%	105.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sebawi	Cakupan pelayanan barang milik daerah	100%	69.540.000	
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sebawi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	40.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sebawi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	40.680.000	
1.5.2	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sebawi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	25.000.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sebawi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	13.180.000	
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sebawi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sebawi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.680.000	
1.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sebawi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sebawi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sebawi	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	87.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sebawi	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	93.851.974	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.801.650	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	22.263.100	
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	65.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	69.787.224	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sebawi	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100%	60.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sebawi	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100%	100.581.880	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sebawi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	35.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sebawi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	62.451.880	
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sebawi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sebawi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	730.000	
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sebawi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sebawi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	37.400.000	
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sebawi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sebawi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	-	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sebawi	Nilai SAKIP Kecamatan BB dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BB	100%	33.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sebawi	Nilai SAKIP Kecamatan BB dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BB	100%	66.755.019	
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sebawi	Pesentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	10.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sebawi	Pesentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	13.650.787	
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	10.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	13.650.787	
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sebawi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	3.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sebawi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	4.800.000	

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat Sebawi 2025

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	3.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	4.800.000	
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Sebawi	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	20.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Sebawi	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	48.304.232	
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	20.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	48.304.232	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sebawi	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan 7 Desa dan Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina	100%	100.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sebawi	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan 7 Desa dan Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina	100%	84.359.922	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Sebawi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan pemberdayaan Desa	100%	90.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Sebawi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan pemberdayaan Desa	100%	74.146.922	
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sebawi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	10.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sebawi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	11.909.344	
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	80.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	62.237.578	
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sebawi	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	10.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sebawi	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	10.213.000	
3.2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7 Laporan	10.213.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sebawi	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	20.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sebawi	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	10.388.846	
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Sebawi	Persentase pelaksanaan kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	20.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Sebawi	Persentase pelaksanaan kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	10.388.846	
4.1.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	20.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Sebawi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	10.388.846	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sebawi	Peningkatan Kegiatan Kerukunan dan Wawasan Kebangsaan	4 Kegiatan	35.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sebawi	Peningkatan Kegiatan Kerukunan dan Wawasan Kebangsaan	4 Kegiatan	24.618.196	
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sebawi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	35.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sebawi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	24.618.196	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Sebawi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	20.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Sebawi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	19.423.773
5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Sebawi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	120 Orang	15.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Sebawi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	120 Orang	5.194.423
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sebawi	Pesentase Desa dengan Tatakelola dan Administrasi Baik	100%	50.000.006	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sebawi	Pesentase Desa dengan Tatakelola dan Administrasi Baik	100%	33.900.006
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sebawi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	50.000.006	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sebawi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	33.900.006
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Sebawi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Sebawi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	5.194.423

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Sebawi	Jumlah dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Sebawi	Jumlah dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	14.352.786	
6.1.3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Sebawi	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	15.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Sebawi	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	14.352.786	
6.1.4	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kecamatan Sebawi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kecamatan Sebawi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7 Dokumen	-	
JUMLAH TOTAL					2.120.315.472	JUMLAH TOTAL					2.140.298.483

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro. Indikator kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dan partisipasi sektor swasta (masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai sasaran yang ditetapkan.

Capaian indikator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapat capaian indikator makro tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat Pemajuan Budaya, yaitu pemerintah harus fokus pada meningkatkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dalam mewujudkan kelestarian dan pengembangan budaya daerah dengan memajukan pengelolaan seni budaya, sejarah, dan museum daerah.
- b. Indeks Kerukunan Sosial, yaitu pemerintah harus fokus pada meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, bersatu, dan berwawasan kebangsaan dalam mewujudkan peningkatan kesadaran hukum dan ketenteraman dan ketertiban, peningkatan kualitas hidup beragama, peningkatan efektivitas koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, dan peningkatan kerukunan hidup dan wawasan kebangsaan.
- c. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu pemerintah harus fokus pada meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan peningkatan indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik, peningkatan keterbukaan informasi publik, tersedianya data dan statistik yang terintegrasi, peningkatan keamanan cyber daerah, peningkatan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), peningkatan pengelolaan arsip, tercapainya realisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan, tersedianya SAKIP komponen perencanaan daerah dan capaian kinerja, penerapan sistem merit, dan peningkatan dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD.

- d. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu pemerintah harus fokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan peningkatan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terintegrasi.
- e. Persentase infrastruktur dalam kondisi yang mantap, yaitu pemerintah harus fokus pada peningkatan infrastruktur dalam kondisi mantap untuk mendukung perekonomian daerah dalam mewujudkan peningkatan jalan kabupaten dalam kondisi mantap, peningkatan jalan poros desa dalam kondisi mantap, peningkatan jaringan irigasi, tersedianya rumah layak huni, peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum, peningkatan rumah tangga bersanitasi, dan tersedianya dermaga/steher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang.
- f. Jumlah desa mandiri, yaitu pemerintah harus fokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan peningkatan status desa, dan peningkatan satuan pemukiman transmigrasi menuju tahap kemandirian.
- g. Laju pertumbuhan ekonomi, yaitu pemerintah harus fokus pada peningkatan kemandirian perekonomian daerah dengan peningkatan laju PDRB di setiap sektor yang diwujudkan dengan peningkatan koperasi yang berkualitas, laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor industri pengolahan, sektor jasa perusahaan, sektor pertanian dan perikanan, peningkatan kewirausahaan, dan peningkatan kunjungan wisata.
- h. Indeks ketahanan pangan, yaitu pemerintah harus fokus peningkatan kemandirian perekonomian daerah dengan mewujudkan ketahanan pangan.
- i. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu pemerintah harus fokus peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing yang diwujudkan dengan Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), capaian indikator kabupaten layak anak, angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), indeks pembangunan literasi, tingkat prestasi olahraga, dan tingkat prestasi pemuda.

- j. Angka Kemiskinan dan Indeks Gizi, yaitu pemerintah harus fokus peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam perlindungan sosial terhadap PMKS yang diwujudkan dengan tingkat perlindungan sosial.
- k. Tingkat Pengangguran Terbuka, yaitu pemerintah harus fokus peningkatan kesempatan kerja dengan tersedianya lapangan pekerjaan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan dengan mewujudkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).
- l. Indeks Resiko Bencana, yaitu pemerintah harus fokus peningkatan pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana dengan mewujudkan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW, dan indeks ketahanan daerah.
- m. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yaitu pemerintah harus fokus peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan mewujudkan indeks kualitas lahan, air, dan udara.

Capaian kinerja pembangunan ditingkat Kecamatan selama tahun 2016 sampai dengan 2021 yang tercermin pada tingkat capaian indikator makro merupakan kontribusi pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sambas, baik yang menyangkut bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang sarana dan prasarana. Selain peran pemerintah Kecamatan dan Kabupaten, juga peran seluruh komponen masyarakat, swasta dan stakeholder pembangunan mempunyai andil yang besar dalam menyumbang tingkat pencapaian kinerja pembangunan, diantaranya melalui program swadaya masyarakat dengan kegiatan gotong royong atau perusahaan-perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun OPD yang terkait lainnya. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang

berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kecamatan sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Bahwa usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat dusun/lingkungan melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang di bawah ke form Musrenbangdes. Pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program/kegiatan/sub kegiatan yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing perangkat daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis dan/atau Koordinator Wilayah di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari desa yang diumumkan ke organisasi perangkat daerah terkait sebagaimana Tabel TC.32 terlampir.

Tabel T-C.32.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN SAMBAS

Usulan Kegiatan		Volume	Lokasi	Jumlah	Desa	OPD	Kode
KECAMATAN SEBAWI				43.536.000.000			
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA				15.986.000.000			
1	RehabWC5UnitSiswaLaki-lakidanPerempuanSMP Tunas Harapan Sebawi	1 Unit	Desa Sebawi	120.000.000	SEBAWI	DIKBUD	042.095-019
1	Pembangunan Drainase SMPN 1 Sebawi	200 Meter	DesaSempalai Sebedang	300.000.000	SEMPELAI SEBEDANG	DIKBUD	042.096-026
1	Peningkatan SDN 9 Sepuk	1 Paket	Desa Sepuk Tanjung	3.000.000.000	SEPUK TANJUNG	DIKBUD	042.097-005
1	Pembangunan Gedung SLTA/SMK	1 Paket	Desa Sebangun	5.000.000.000	SEBANGUN	DIKBUD	042.098-002
1	RehabberatGedung/RuangKelasMTSMualamalah Sebataan	3 Kelas	Desa Tempatan	450.000.000	TEMPATAN	DIKBUD	042.099-004
1	Peningkatan SDN 10 Sebatu / Rehab berat	1 Paket	Dusun Sebatu Timur	250.000.000	TEBING BATU	DIKBUD	042.100-007
1	PEMBANGUNAN MESJID BARU JAMI' AL-IRHAM	1 Paket	DESARANTAU PANJANG	700.000.000	SEMANJANG	SETDA	042.101-047
2	Rehab WC 3 Unit SDN 5 Sebawi	3 Unit	Desa Sebawi	100.000.000	SEBAWI	DIKBUD	042.095-001
2	Pembangunan Penampung Air Hujan (PAH) dan PembangunanGarasi/DrainaseSDN2SEMPALAI	1 Paket	DesaSempalai Sebedang	150.000.000	SEMPELAI SEBEDANG	DIKBUD	042.096-029
2	Peningkatan SDN 4 Tanjung Putat / Rehab berat	1 Paket	Desa Sepuk Tanjung	800.000.000	SEPUK TANJUNG	DIKBUD	042.097-004
2	Pengadaan Meubeler SDN 1 Dusun Kota Bangun	1 Paket	Desa Sebangun	200.000.000	SEBANGUN	DIKBUD	042.098-004
2	Rehab berat Gedung /Ruang Kelas MIS Sebataan	3 Kelas	Desa Tempatan	450.000.000	TEMPATAN	DIKBUD	042.099-005
2	Peningkatan Mushalla Al Misbah	1 Paket	SEBATU BARAT	50.000.000	TEBING BATU	SETDA	042.100-015
2	PEMBANGUNAN/PENINGKATAN HALAMAN SEKOLAH	1 Paket	SDN8RANTAU PANJANG	35.000.000	SEMANJANG	DIKBUD	042.101-001
3	Rehab Bangunan SDN 05 Sebawi A	1 Paket	Desa Sebawi	500.000.000	SEBAWI	DIKBUD	042.095-002

	Usulan Kegiatan	Volume	Lokasi	Jumlah	Desa	OPD	Kode
3	PembangunanLokalkelasSDN3SEMPALAI(Rehab Berat)	1 Paket	DesaSempalai Sebedang	700.000.000	SEMPELAI SEBEDANG	DIKBUD	042.096-030
3	Pembangunan tribun sepak bola	1 Paket	Desa Sepuk Tanjung	250.000.000	SEPUK TANJUNG	DISPARPORA	042.097-042
3	Rehab Gedung SDN 11 Dusun Sekenang	3 Unit	Desa Sebangun	450.000.000	SEBANGUN	DIKBUD	042.098-003
3	Rehab Berat Ruang Kelas SMPN 4 Sebawi	1 Kelas	Desa Tempatan	300.000.000	TEMPATAN	DIKBUD	042.099-008
3	Peningkatan Masjid Nurul Huda Tebing Rubuh	1 Paket	Dusun Tebing Rubuh	100.000.000	TEBING BATU	SETDA	042.100-016
3	PEMBANGUNANPENINGKATANLANTAIRUANG BELAJAR	1 Paket	SDN8RANTAU PANJANG	46.000.000	SEMANJANG	DIKBUD	042.101-006
4	Rehab Mi Ikhlhasul Amal Sebawi	1 Paket	Desa Sebawi	500.000.000	SEBAWI	DIKBUD	042.095-003
4	sampan karet	3 Unit	DesaSempalai Sebedang	125.000.000	SEMPELAI SEBEDANG	BPBD	042.096-056
4	Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak	1 Paket	Desa Sepuk Tanjung	15.000.000	SEPUK TANJUNG	DP3AP2KB	042.097-052
4	Peningkatan Cagar Budaya Surau Raden Sulaiman	1 Paket	Desa Sebangun	500.000.000	SEBANGUN	DIKBUD	042.098-037
4	Rehab Berat Ruang Kelas SDN 7 Sebataan	1 Kelas	Desa Tempatan	125.000.000	TEMPATAN	DIKBUD	042.099-007
4	Peningkatan Masjid Ar Rahman	1 Paket	Dusun Sebatu Barat	150.000.000	TEBING BATU	SETDA	042.100-018
4	PENGADAANAPELUARDANDALAMPAUD SERANTAU I dan SERANTAU II	1 Paket	PAUDSERANTAU I dan SERANTAU II	20.000.000	SEMANJANG	DIKBUD	042.101-007
5	Meubelair SDN 5 Sebawi A	1 Paket	Desa Sebawi	100.000.000	SEBAWI	DIKBUD	042.095-004
5	Sepeda Air Danau Sebedang	5 Unit	DesaSempalai Sebedang	125.000.000	SEMPELAI SEBEDANG	DISPARPORA	042.096-020
5	Pelatihan/Penyuluhan/sosialisasikepadamasyarakatdi bidang hukum dan perlindungan masyarakat.	1 Paket	Desa Sepuk Tanjung	25.000.000	SEPUK TANJUNG	SETDA	042.097-041
5	Cor Beton Halaman SMPN 3 SATAP Sebawi	1 Paket	Desa Sebangun	100.000.000	SEBANGUN	DIKBUD	042.098-008
5	pemberianhonortahunankepadaamil.gurungajidan pengurus jenazah	30 Orang	Desa Tempatan	30.000.000	TEMPATAN	SETDA	042.099-013

	Usulan Kegiatan	Volume	Lokasi	Jumlah	Desa	OPD	Kode
5	Rehab Mis Al Wustho Tebing Rubuh	1 Paket	Dusun Tebing Rubuh	200.000.000	TEBING BATU	DIKBUD	042.100-006
5	PENGADAAN APE LUAR DAN DALAM PAUD	1 Paket	PAUD SERANTAU 2	20.000.000	SEMANJANG	DIKBUD	042.101-008
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				23.535.000.000			
1	Pembangunan Jembatan Komposit RT 004	1 Paket	Desa Sebawi	300.000.000	SEBAWI	PU-PR	042.095-014
1	Pembangunan Jalan di Danau Sebedang	4 Kilo Meter	Desa Sempalai Sebedang	3.000.000.000	SEMPELAI SEBEDANG	PU-PR	042.096-028
1	Peningkatan Jalan	1 Paket	Desa Sepuk Tanjung	400.000.000	SEPUK TANJUNG	PU-PR	042.097-012
1	Pembangunan Jalan Kabupaten di Desa Sebangun	2 Kilo Meter	Desa Sebangun	10.000.000.000	SEBANGUN	PU-PR	042.098-016
1	Pelebarandan Pengerasan Jalan Raya Desa Tempatan (Jalan Poros Sekuyang -Kota Bangun)	2500 Meter	Desa Tempatan	2.500.000.000	TEMPATAN	PU-PR	042.099-001
1	Aspal Jalan H. Sirad	1000 Meter	Dusun Sebatu Timur	450.000.000	TEBING BATU	PU-PR	042.100-008
1	PEMBANGUNAN LANJUTAN JALAN GANG PERASAK	1 Paket	DESA RANTAU PANJANG GANG PERASAK RT 001	350.000.000	SEMANJANG	PU-PR	042.101-016
2	Lanjutan Peningkatan Aspal Jalan Pasar Sebawi	1 Paket	Desa Sebawi	200.000.000	SEBAWI	PU-PR	042.095-012
2	Normalisasi Sungai	2 Kilo Meter	Desa Sempalai Sebedang	150.000.000	SEMPELAI SEBEDANG	PU-PR	042.096-041
2	Peningkatan Jalan	1 Paket	Dusun Tanjung Putat RT 005 RW 001	200.000.000	SEPUK TANJUNG	PU-PR	042.097-011
2	Pembangunan Turap Pasang Batu Kali RT 007 / RW 003	1 Paket	Desa Sebangun	200.000.000	SEBANGUN	PU-PR	042.098-030
2	Pmbangunan Jembatan Jalan Raya Desa Tempatan	28 Unit	Desa Tempatan	800.000.000	TEMPATAN	PU-PR	042.099-002
2	Peningkatan Jalan Siliwangi dengan Aspal	1 Paket	Dusun Tebing Rubuh	150.000.000	TEBING BATU	PU-PR	042.100-017
2	PEMBANGUNAN LANJUTAN JALAN POROS DUSUN GANG KUALA	1 Paket	DESA RANTAU PANJANG GANG KUALA	350.000.000	SEMANJANG	PU-PR	042.101-017
3	Normalisasi Sungai Besar Sebawi	1 Paket	Desa Sebawi	200.000.000	SEBAWI	PU-PR	042.095-017

	Usulan Kegiatan	Volume	Lokasi	Jumlah	Desa	OPD	Kode
3	Pembangunan Dinding Penahan Tanah	2 Kilo Meter	DesaSempalai Sebedang	400.000.000	SEMPELAI SEBEDANG	PU-PR	042.096-035
3	Peningkatan jalan	1 Paket	DusunGunungSepuk RT 009-010 RW 002	200.000.000	SEPUK TANJUNG	PU-PR	042.097-010
3	PeningkatanJalanDesa(PenimbunanBadanJalan)di Dusun Sekenang RT 007 / RW 003	800 Meter	Desa Sebangun	200.000.000	SEBANGUN	PU-PR	042.098-014
3	Pengerasan Jalan Lingkungan /gang Sepandan - sebatu	1500 Meter	Desa Tempatan	240.000.000	TEMPATAN	PERKIM LH	042.099-003
3	REHAB JALAN DUSUN TEBING RUBUH	700 Meter	DUSUNTEBING RUBUH	250.000.000	TEBING BATU	PU-PR	042.100-001
3	PENINGKATANN JALAN SMPN 2 SEBAWI	500 Meter	DESARANTAU PANJANG	350.000.000	SEMANJANG	PU-PR	042.101-030
4	PembangunanJembatanRT002-RT003(Samping Rumah Achin)	1 Paket	Desa Sebawi	250.000.000	SEBAWI	PU-PR	042.095-016
4	Pembangunan Jalan di Dusun Cengal	2 Kilo Meter	DesaSempalai Sebedang	400.000.000	SEMPELAI SEBEDANG	PERKIM LH	042.096-027
4	Peningkatan Jalan M. Arief	1 Paket	DusunGunungSepuk RT 008 RW 002	100.000.000	SEPUK TANJUNG	PERKIM LH	042.097-019
4	PembangunanJalanRabatBetonmenujuDesaTebing Batu	132 Meter	Desa Sebangun	65.000.000	SEBANGUN	PU-PR	042.098-010
4	Normalisasi Sungai/Parit	1 Paket	Desa Tempatan	150.000.000	TEMPATAN	PU-PR	042.099-015
4	PEMBERSIHAN PARIT MANUAL	1000 Meter	SEBATU BARAT	120.000.000	TEBING BATU	PU-PR	042.100-004
4	PAM DESA	1000 Meter	DESARANTAU PANJANG	500.000.000	SEMANJANG	PERKIM LH	042.101-032
5	Lanjutan Aspal Jalan Maksari RT 009	1 Paket	Desa Sebawi	300.000.000	SEBAWI	PU-PR	042.095-013
5	PembangunanPagar,Gapura,PlangNamaPemakaman Muslim H. Sapoen	1 Paket	DesaSempalai Sebedang	100.000.000	SEMPELAI SEBEDANG	PERKIM LH	042.096-031
5	Dinding Penahan Tanah 200m x 1m x 1,3 m	1 Paket	DusunTanjungputat RT 006 RW 001	100.000.000	SEPUK TANJUNG	PU-PR	042.097-032
5	PenimbunanJalanSebawiB-DatokRonggoRT003/ RW 002	900 Meter	Desa Sebangun	100.000.000	SEBANGUN	PU-PR	042.098-011

	Usulan Kegiatan	Volume	Lokasi	Jumlah	Desa	OPD	Kode
5	Pengadaan PAH	11 Unit	Desa Tempatan	60.000.000	TEMPATAN	PERKIM LH	042.099-011
5	RABAT BETON JALAN USAHA TANI PERIGI MAWANG	500 Meter	SEBATU BARAT	200.000.000	TEBING BATU	PU-PR	042.100-002
5	NORMALISASIPARIT JUMBO	4000 Meter	DESARANTAU PANJANG	200.000.000	SEMANJANG	PU-PR	042.101-025
EKONOMI DAN SDA				4.015.000.000			
1	Pelatihan Pengemasan Produk	1 Paket	Desa Sebawi	30.000.000	SEBAWI	DISKUMINDAG	042.095-021
1	Bantuan Bibit Ternak ayam petelur	1 Paket	DesaSempalai Sebedang	400.000.000	SEMPELAI SEBEDANG	PERTANIAN-PANGAN	042.096-036
1	Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana	1 Paket	Desa Sepuk Tanjung	150.000.000	SEPUK TANJUNG	PERTANIAN-PANGAN	042.097-050
1	Pelatihan anekaminumandaribuahjeruk dan pengemasan	1 Paket	Desa Sebangun	25.000.000	SEBANGUN	DISKUMINDAG	042.098-041
1	Pembangunan JUT	1 Paket	Desa Tempatan	300.000.000	TEMPATAN	PERTANIAN-PANGAN	042.099-016
1	Pengadaan Racun atau Herbisida untuk kelompok Tani	1 Paket	Desa Tebing Batu	250.000.000	TEBING BATU	PERTANIAN-PANGAN	042.100-014
1	PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI RT 013	1000 Meter	DESARANTAU PANJANG	180.000.000	SEMANJANG	PERTANIAN-PANGAN	042.101-029
2	Pengadaan Bibit Sayuran	1 Paket	Desa Sebawi	50.000.000	SEBAWI	PERTANIAN-PANGAN	042.095-022
2	Pembangunan Saung Tani (Gedung Alsintan)	1 Unit	DesaSempalai Sebedang	100.000.000	SEMPELAI SEBEDANG	PERTANIAN-PANGAN	042.096-034
2	Pengadaan mesin penggiling padi	1 Paket	Desa Sepuk Tanjung	150.000.000	SEPUK TANJUNG	PERTANIAN-PANGAN	042.097-046
2	Pengadaan Alat-Alat Pertanian (Traktor Mini)	1 Paket	Desa Sebangun	200.000.000	SEBANGUN	PERTANIAN-PANGAN	042.098-042
2	Pengadaan ALSINTAN (Mesin Perontok) Cultivator	1 Unit	Desa Tempatan	100.000.000	TEMPATAN	PERTANIAN-PANGAN	042.099-010
2	Pengadaan Pupuk untuk Kelompok Tani	1 Paket	Desa Tebing Batu	150.000.000	TEBING BATU	PERTANIAN-PANGAN	042.100-011
2	BANTUAN BIBIT TERNAK KAMBING	1 Paket	DESARANTAU PANJANG	50.000.000	SEMANJANG	P2-KESWAN	042.101-057
3	Bantuan Pupuk Pestisida dan Pupuk NPK	1 Paket	Desa Sebawi	50.000.000	SEBAWI	PERTANIAN-PANGAN	042.095-024

	Usulan Kegiatan	Volume	Lokasi	Jumlah	Desa	OPD	Kode
3	Mesin Pengolah Pakan Ternak	1 Unit	DesaSempalai Sebedang	100.000.000	SEMPELAI SEBEDANG	P2-KESWAN	042.096-016
3	Peningkatanproduksitanamanpangan(alat pengelolaan)	1 Paket	Desa Sepuk Tanjung	100.000.000	SEPUK TANJUNG	PERTANIAN-PANGAN	042.097-045
3	PengembanganIntensifikasiTanamanPangan(Padi, Palawija) Belanja Pupuk NPK	1 Paket	Desa Sebangun	100.000.000	SEBANGUN	PERTANIAN-PANGAN	042.098-050
3	Pengadaan ALat Tangkap Ikan	10 Unit	Desa Tempatan	35.000.000	TEMPATAN	P2-KESWAN	042.099-012
3	Pengadaan Bibit kambing	1 Paket	Desa Tebing Batu	200.000.000	TEBING BATU	P2-KESWAN	042.100-013
3	BANTUANSARANADANPRASARANABUDIDAYA IKAN KOLAM TERPAL	1 Paket	DESARANTAU PANJANG	150.000.000	SEMANJANG	P2-KESWAN	042.101-052
4	Pengadaan Bibit Sayuran	1 Paket	Desa Sebawi	50.000.000	SEBAWI	PERTANIAN-PANGAN	042.095-026
4	Pelatihan Kelompok Perempuan Usaha Mikro	1 Paket	DesaSempalai Sebedang	25.000.000	SEMPELAI SEBEDANG	DISKUMINDAG	042.096-043
4	Pengadaan mesin perontok padi	1 Paket	Desa Sepuk Tanjung	300.000.000	SEPUK TANJUNG	PERTANIAN-PANGAN	042.097-049
4	PembangunanJalanUsahaTani(RabatBeton)RT011/ RW 005	100 Meter	Desa Sebangun	50.000.000	SEBANGUN	PERTANIAN-PANGAN	042.098-019
4	Bantuan Kegiatan Pengadaan Ikan	1 Paket	Desa Tebing Batu	150.000.000	TEBING BATU	P2-KESWAN	042.100-012
4	BANTUAN PUPUK SUBSIDI	1 Paket	DESARANTAU PANJANG	70.000.000	SEMANJANG	PERTANIAN-PANGAN	042.101-054
5	BantuanModalUntukUsahaPeningkatanPendapatan Keluarga (UP2K)	1 Paket	Desa Sebawi	50.000.000	SEBAWI	DISKUMINDAG	042.095-018
5	Pengadaan Mesin Penggiling Padi (RMU)	1 Unit	DesaSempalai Sebedang	150.000.000	SEMPELAI SEBEDANG	PERTANIAN-PANGAN	042.096-017
5	Pengadaan ternak dan unggas	1 Paket	Desa Sepuk Tanjung	100.000.000	SEPUK TANJUNG	P2-KESWAN	042.097-047
5	PembangunanJalanUsahaTani(RabatBeton)RT009/ RW 004	100 Meter	Desa Sebangun	50.000.000	SEBANGUN	PERTANIAN-PANGAN	042.098-018
5	Pengadaan Peternakan Sapi untuk Kelompok Tani	50 Ekor	Desa Tebing Batu	100.000.000	TEBING BATU	P2-KESWAN	042.100-010
5	BANTUAN PERAHU NELAYAN	1 Paket	DESARANTAU PANJANG	50.000.000	SEMANJANG	P2-KESWAN	042.101-053

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart penyelenggaraan *Good Governance* and akuntabilitas publik.

Visi Pembangunan Nasional yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**. Atas dasar pertimbangan motto **“Sambas Hebat”** serta visi RPJPD Kabupaten Sambas dan pencapaian RPJMD lima tahun pertama (tahun 2006 – 2011) dan lima tahun kedua (2012 – 2016) serta memperhatikan perkembangan lingkunganstrategis dan tantangan daerah dalam isu – isu strategis maka visi pembangunan daerah tahun 2016 – 2021 adalah : **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang Berakhlakul Karimah, Unggul, dan Sejahtera”**. Visi pembangunan daerah Kabupaten Sambas yang dirumuskan tersebut diharapkan mampu memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.

Perumusan visi tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut :

- a. **Masyarakat Kabupaten Sambas yang Berakhlakul Karimah** adalah suatu kondisi seluruh lapisan masyarakat dan aparatur yang memiliki sikap dan nurani bersendikan nilai – nilai agama dan Ketuhanan, kemanusiaan universal, taat pada aturan serta norma etika yang berlaku di masyarakat sebagai pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. **Unggul** adalah suatu kondisi kualitas moral, sosial dan intelektual insani yang berkembang dengan baik, memiliki daya saing, kreatif, inovatif, cinta terhadap pengetahuan dan teknologi sehingga tercapai pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya; dan
- c. **Sejahtera** adalah suatu kondisi terpenuhinya hak – hak dasar dan sekunder masyarakat dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman dan damai.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 tersebut, maka dirumuskan 8 misi pembangunan Kabupaten Sambas sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar semua aspek kehidupan masyarakat;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan mental, spritual berlandaskan sendi – sendi keagamaan, budaya, dan berwawasan kebangsaan;
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang sinergis antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian disegala sektor;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menuju pembangunan yang berkeadilan;
5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur serta tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien;
6. Meningkatkan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan;
7. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum tanpa diskriminasi; dan
8. Meningkatkan ketenteraman, ketertiban, stabilitas keamanan, dan perlindungan masyarakat.

Kedudukan Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dengan Visi adalah “Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”. Memperhatikan Visi Kabupaten Sambas tersebut diatas, proses perencanaan yang transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi

sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan (*acceptancy*) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas selaku Perangkat Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi adalah transformasi pelayanan publik. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pencapaian sasaran pokok ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi transformasi pelayanan publik, melalui penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan publik dengan peningkatan indeks kepuasan masyarakat.

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan beorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi.

Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan Sebawi yang akan mengisi suatu organisasi dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditetapkankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk menguasai IPTEK.

Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi (Iptek). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis.

Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Kecamatan Sebawi adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif yang dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan (RKPD) yang selanjutnya menjadi dasar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Kedepan, Kecamatan Sebawi diharapkan dapat secara fokus dalam proses perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas produk perencanaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi, isu-isu penting yang dihadapi dapat ditinjau dari 5 (lima) arah kebijakan yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Dalam urusan kewilayahan di kecamatan terdapat permasalahan pokok yaitu terkait isu kualitas ada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Identifikasi rumusan isu-isu penting pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi didasarkan pada hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi terhadap capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir terdapat rumusan permasalahan pokok dalam upaya “Bagaimanakah Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sebawi?” Apabila salah dalam menentukan apa yang akan diproduksi untuk memenuhi keinginan yang dilayani, bisa berakibat pada ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah bukan semakin baik seperti yang diharapkan, namun mengalami pasang surut.

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan terhadap kepentingan publik

secara substantif sudah selayaknya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah tersebut. Namun dalam realitanya masalah pelayanan publik di lingkungan pemerintahan sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya kasus pelayanan publik yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Pelayanan yang berbelit-belit, in-efisiensi, lambat, tidak ramah serta tidak jelasnya waktu penyelesaian dan tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan bukti nyata bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah masih rendah dan pelayanan publik belum berkualitas. Beberapa faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif, perilaku organisasi yang koruptif, lemahnya implementasi kebijakan, belum diterapkannya prinsip good governance dan komunikasi birokrasi.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan publik kecamatan dalam meningkatnya pembinaan dan pengawasan, pemerintahan Umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, dan pelayanan umum dapat diidentifikasi beberapa isu-isu penting yang dijumpai antara lain:

1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
 - a. Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
 - b. Birokrasi yang belum efektif dan efisien.
 - c. Perencanaan kegiatan pelayanan belum terorganisasi dengan baik.
 - d. Hampir semua pelayanan publik belum memenuhi standar.
2. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
 - a. Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk.
 - b. Pada berbagai kasus sering terjadi bahwa upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak berhasil mengembangkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat disebabkan belum optimalnya peran serta

dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.

- c. Pandemi Covid-19 telah mampu mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat luas, terutama di Indonesia. Mulai dari sektor pendidikan, perekonomian, hingga pada sektor spiritual umat beragama dalam menjalankan ibadah.
 - d. Pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan yang merupakan masalah pokok nasional dan penanggulangannya tidak dapat ditunda lagi dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.
 - e. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan.
 - f. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.
3. Ketenteraman dan ketertiban umum
- a. Masih kurang dan belum optimalnya penanganan kasus pelanggaran dan kasus-kasus lainnya yang meresahkan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
 - b. Masih lemahnya penyelesaian pelanggaran Perda dan/atau peraturan perundang-undangan.
 - c. Masih tingginya kenakalan remaja di wilayah kecamatan yang diakibatkan oleh menurunnya penerapan budaya lokal.
 - d. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
 - e. Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- Tantangan yang paling berpotensi menjadi ancaman terhadap kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa sekarang ini justru ini lebih banyak muncul dari dalam negeri sendiri. Seperti penyebaran isu-isu yang bersifat sara oleh kelompok-kelompok tertentu yang telah meresahkan ketenteraman masyarakat. Isu-isu itu disebarluaskan melalui pernyataan-pernyataan sikap atau ungkapan-ungkapan yang dapat menimbulkan rasa permusuhan,

pertentangan antara suku, agama dan keturunan. Berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi dewasa ini masih tetap merintang perjalanan bangsa Indonesia yang menimbulkan kerawanan yang tidak ringan, kondisi baru, tantangan baru, dan perubahan-perubahan nilai yang terjadi.

5. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
 - a. Masalah pembangunan fisik dan sosial masih mewarna isu-isu yang muncul di berbagai desa.
 - b. Penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa yang meliputi Administrasi Umum, Administrasi Keuangan, Administrasi Penduduk, Administrasi Pembangunan dan Administrasi lainnya belum berjalan dengan baik dimana ada beberapa buku administrasi yang tidak diterapkan dan tidak lengkapnya pengisian beberapa buku administrasi desa.
 - c. Komunikasi Kebijakan dan pendampingan belum dilakukan secara rutin, dalam hal sumber daya, baik dari keterampilan kepala desa dan perangkat desa, anggota BPD, serta lembaga kemasyarakatan desa.
 - d. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur desa, anggota BPD, serta lembaga kemasyarakatan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
 - e. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
 - f. Belum optimalnya laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan.
 - g. Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan.
6. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - a. Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur.
 - b. Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan publik.
 - c. Keterbatasan pelaksana teknis terhadap layanan dan belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas tersebut selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 pada Misi 1 yaitu: Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial

dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Adapun tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.” Indikator tujuan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sambas adalah “indeks kepuasan masyarakat di kecamatan” dengan target kinerja pada tahun 2025 yaitu 90,01–92,00 dengan kategori “A”.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumberdaya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Berdasarkan pernyataan tujuan ditetapkanlah sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan.” Indikator sasaran Kecamatan Sebawi adalah indeks kepuasan masyarakat, di Kecamatan Sebawi dengan target kinerja pada tahun 2025 yaitu 88,35 dengan kategori “B”.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rancangan Rencana Kerja untuk tahun 2025, program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi pada dasarnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah dan penambahan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah:

1. mendukung agar tercapainya visi dan misi kepala daerah Kabupaten Sambas di Kecamatan Sebawi;
2. program, kegiatan dan sub kegiatan rutin setiap tahun;

3. program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat
4. program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pembangunan sumber daya manusia, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi, sosial budaya yang menjadi skala prioritas di masing-masing desa se Kecamatan Sebawi.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sebawi akan melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 35 sub kegiatan untuk 1 (satu) tahun kedepan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.2.140.298.462,00. Adapun sifat penyebaran program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas 6 kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.1.920.276.484,00 digunakan untuk gaji dan kesejahteraan pegawai, kebutuhan operasional organisasi, akuntabilitas kinerja, pengembangan kompetensi pegawai, dan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana khususnya keperluan pelayanan publik.
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri atas 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.66.755.019,00 digunakan untuk penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat, perencanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, pengendalian pelayanan, dan pelaksanaan pelayanan yang berhubungan langsung kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terdiri atas 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.84.359.922,00 digunakan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan pembangunan, peningkatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat, dan swasta untuk ikut berperan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat, penanganan stunting dan dampak Pandemi Covid-19, dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
4. Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.10.388.846,00 digunakan untuk sinergitas dengan Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan dalam penanganan ketenteraman dan ketertiban umum, harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri atas 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.24.618.196,00 digunakan untuk pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, dan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terdiri atas 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.33.899.995,00 digunakan untuk tata kelola administrasi pemerintahan desa, keuangan dan aset desa, tugas dan fungsi aparatur desa, perencanaan pembangunan desa, pendampingan desa, dan koordinasi pelaksanaan pembangunan di kawasan perdesaan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2025 dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sebawi secara keseluruhan pada tahun 2025 terdiri dari 6 program, 14 kegiatan dan 33 sub kegiatan, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel T-C.33 di bawah ini:

Tabel T-C.33.

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN SAMBAS**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUM BER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kecamatan Sebawi	100%	1.882.315.472	DAU		100%	2.070.547.019
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sebawi	100%	12.000.000	DAU		100%	13.200.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sebawi	2 Dokumen	3.000.000	DAU		2 Dokumen	3.300.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Sebawi	2 Dokumen	3.000.000	DAU		2 Dokumen	3.300.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Sebawi	2 Dokumen	3.000.000	DAU		2 Dokumen	3.300.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Sebawi	2 Laporan	3.000.000	DAU		2 Laporan	3.300.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Sebawi	100%	1.377.430.299	DAU		100%	1.515.173.329
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sebawi	14 Bulan	1.341.430.299	DAU		14 Bulan	1.475.573.329
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Sebawi	1 Dokumen	30.000.000	DAU		1 Dokumen	33.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUM BER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Sebawi	2 Laporan	3.000.000	DAU		2 Laporan	3.300.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Sebawi	18 Laporan	3.000.000	DAU		18 Laporan	3.300.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	Kecamatan Sebawi	100%	50.000.000	DAU		100%	55.000.000
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Sebawi	1 Paket	20.000.000	DAU		1 Paket	22.000.000
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Sebawi	3 Orang	30.000.000	DAU		3 Orang	33.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Sebawi	100%	190.885.173	DAU		100%	209.973.690
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kecamatan Sebawi	1 Paket	12.000.000	DAU		1 Paket	13.200.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUM BER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kecamatan Sebawi	1 Paket	12.000.000	DAU		1 Paket	13.200.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kecamatan Sebawi	1 Paket	40.885.173	DAU		1 Paket	44.973.690
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kecamatan Sebawi	1 Paket	24.000.000	DAU		1 Paket	26.400.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Sebawi	1 Dokumen	2.000.000	DAU		1 Dokumen	2.200.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sebawi	1 Laporan	100.000.000	DAU		1 Laporan	110.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan barang milik daerah	Kecamatan Sebawi	100%	105.000.000	DAU		100%	115.500.000
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Sebawi	1 Unit	40.000.000	DAU		1 Unit	44.000.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Sebawi	5 Unit	25.000.000	DAU		5 Unit	27.500.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Sebawi	1 Unit	25.000.000	DAU		1 Unit	27.500.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUM BER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Sebawi	2 Unit	15.000.000	DAU		2 Unit	16.500.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kecamatan Sebawi	100%	87.000.000	DAU		100%	95.700.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sebawi	1 Laporan	2.000.000	DAU		1 Laporan	2.200.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Sebawi	1 Laporan	20.000.000	DAU		1 Laporan	22.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kecamatan Sebawi	1 Laporan	65.000.000	DAU		1 Laporan	71.500.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	Kecamatan Sebawi	100%	60.000.000	DAU		100%	66.000.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Sebawi	6 Unit	35.000.000	DAU		6 Unit	38.500.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Sebawi	1 Unit	5.000.000	DAU		1 Unit	5.500.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUM BER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kecamatan Sebawi	1 Unit	15.000.000	DAU		1 Unit	16.500.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kecamatan Sebawi	2 Unit	5.000.000	DAU		2 Unit	5.500.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SAKIP Kecamatan BB dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BB	Kecamatan Sebawi	100%	33.000.000	DAU		100%	36.300.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sebawi	100%	10.000.000	DAU		100%	11.000.000
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Sebawi	2 Laporan	10.000.000	DAU		2 Laporan	11.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sebawi	100%	3.000.000	DAU		100%	3.300.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sebawi	2 Laporan	3.000.000	DAU		2 Laporan	3.300.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUM BER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Sebawi	100%	20.000.000	DAU		100%	22.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Sebawi	2 Laporan	20.000.000	DAU		2 Laporan	22.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan 7 Desa dan Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina	Kecamatan Sebawi	100%	100.000.000	DAU		100%	110.000.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan pemberdayaan Desa	Kecamatan Sebawi	100%	90.000.000	DAU		100%	99.000.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sebawi	5 Lembaga	10.000.000	DAU		5 Lembaga	11.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sebawi	10 Laporan	80.000.000	DAU		10 Laporan	88.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sebawi	100%	10.000.000	DAU		100%	11.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUM BER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
7.01.02.2.04.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sebawi	7 Laporan	10.000.000	DAU		7 Laporan	11.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sebawi	100%	20.000.000	DAU		100%	22.000.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Sebawi	100%	20.000.000	DAU		100%	22.000.000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Sebawi	2 Laporan	20.000.000	DAU		2 Laporan	22.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Kegiatan Kerukunan dan Wawasan Kebangsaan	Kecamatan Sebawi	4 Kegiatan	35.000.000	DAU		4 Kegiatan	38.500.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sebawi	100%	35.000.000	DAU		100%	38.500.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUM BER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Sebawi	150 Orang	20.000.000	DAU		150 Orang	22.000.000
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Sebawi	120 Orang	15.000.000	DAU		120 Orang	16.500.000
7.1.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Tatakelola dan Administrasi Baik	Kecamatan Sebawi	100%	50.000.000	DAU		100%	55.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sebawi	100%	50.000.000	DAU		100%	55.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUM BER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Sebawi	7 Dokumen	5.000.000	DAU		7 Dokumen	5.500.000
.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Sebawi	7 Dokumen	20.000.000	DAU		7 Dokumen	22.000.000
.7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Sebawi	7 Dokumen	15.000.000	DAU		7 Dokumen	16.500.000
.7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kecamatan Sebawi	7 Dokumen	10.000.000	DAU		7 Dokumen	11.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDAAN PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SEBAWI TAHUN 2025

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2025					PRAKIRAAN MAJU	LOKASI
			DAU	DAK	PAD	LAIN	JUMLAH		
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.920.276.484	-	-	-	1.920.276.484	2.112.304.132	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.261.444	-	-	-	DAU	11.287.588	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	2.565.361	-	-	-	DAU	2.821.897	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	2.565.361	-	-	-	DAU	2.821.897	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	2.565.361	-	-	-	DAU	2.821.897	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD	2.565.361	-	-	-	DAU	2.821.897	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	1.414.709.357	-	-	-	DAU	1.556.180.293	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1.380.298.635	-	-	-	DAU	1.518.328.499	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang	29.280.000	-	-	-	DAU	32.208.000	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun SKPD	2.565.361	-	-	-	DAU	2.821.897	Kecamatan Sebawi

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2025					PRAKIRAAN MAJU	LOKASI
			DAU	DAK	PAD	LAIN	JUMLAH		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.565.361	-	-	-	DAU	2.821.897	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	-	-	-	-	DAU	-	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	-	-	-	-	DAU	-	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umumperangkat daerah	231.331.829	-	-	-	DAU	254.465.012	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18.999.806	-	-	-	DAU	20.899.787	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	17.340.701	-	-	-	DAU	19.074.771	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor	41.989.900	-	-	-	DAU	46.188.890	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	38.339.422	-	-	-	DAU	42.173.364	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	rapat koordinasi dan konsultasi	114.662.000	-	-	-	DAU	126.128.200	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan barang milik daerah	69.540.000	-	-	-	DAU	76.494.000	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	40.680.000	-	-	-	DAU	44.748.000	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Mebel	13.180.000	-	-	-	DAU	14.498.000	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin	15.680.000	-	-	-	DAU	17.248.000	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	93.851.974	-	-	-	DAU	103.237.171	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat	1.801.650	-	-	-	DAU	1.981.815	Kecamatan Sebawi

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2025					PRAKIRAAN MAJU	LOKASI
			DAU	DAK	PAD	LAIN	JUMLAH		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.263.100	-	-	-	DAU	24.489.410	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa administrasi kantor	69.787.224	-	-	-	DAU	76.765.946	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100.581.880	-	-	-	DAU	110.640.068	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional atau lapangan	62.451.880	-	-	-	DAU	68.697.068	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	730.000	-	-	-	DAU	803.000	Kecamatan Sebawi
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	37.400.000	-	-	-	DAU	41.140.000	Kecamatan Sebawi
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SAKIP Kecamatan BB dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BB	66.755.019	-	-	-	DAU	73.430.521	Kecamatan Sebawi
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.650.787	-	-	-	DAU	15.015.866	Kecamatan Sebawi
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.650.787	-	-	-	DAU	15.015.866	Kecamatan Sebawi
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.800.000	-	-	-	DAU	5.280.000	Kecamatan Sebawi
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.800.000	-	-	-	DAU	5.280.000	Kecamatan Sebawi

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2025					PRAKIRAAN MAJU	LOKASI
			DAU	DAK	PAD	LAIN	JUMLAH		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	48.304.232	-	-	-	DAU	53.134.655	Kecamatan Sebawi
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	48.304.232	-	-	-	DAU	53.134.655	Kecamatan Sebawi
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan 7 Desa dan Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina	84.359.922	-	-	-	DAU	92.795.914	Kecamatan Sebawi
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan pemberdayaan Desa	74.146.922	-	-	-	DAU	81.561.614	Kecamatan Sebawi
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.909.344	-	-	-	DAU	13.100.278	Kecamatan Sebawi
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	62.237.578	-	-	-	DAU	68.461.336	Kecamatan Sebawi
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.213.000	-	-	-	DAU	22.662.031	Kecamatan Sebawi
7.01.02.2.04.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10.213.000	-	-	-	DAU	11.234.300	Kecamatan Sebawi
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.388.846	-	-	-	DAU	11.427.731	Kecamatan Sebawi
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.388.846	-	-	-	DAU	11.427.731	Kecamatan Sebawi
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan terkait Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.388.846	-	-	-	DAU	11.427.731	Kecamatan Sebawi

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2025					PRAKIRAAN MAJU	LOKASI
			DAU	DAK	PAD	LAIN	JUMLAH		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Kegiatan Kerukunan dan Wawasan Kebangsaan	24.618.196	-	-	-	DAU	27.080.016	Kecamatan Sebawi
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.618.196	-	-	-	DAU	27.080.016	Kecamatan Sebawi
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan terkait Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	19.423.773	-	-	-	DAU	21.366.150	Kecamatan Sebawi
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan terkait Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5.194.423	-	-	-	DAU	5.713.865	Kecamatan Sebawi
7.1.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Tatakelola dan Administrasi Baik	33.899.995	-	-	-	DAU	37.289.995	Kecamatan Sebawi
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.899.995	-	-	-	DAU	37.289.995	Kecamatan Sebawi
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.194.423	-	-	-	DAU	5.713.865	Kecamatan Sebawi
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset 7 Desa	14.352.786	-	-	-	DAU	15.788.065	Kecamatan Sebawi
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14.352.786	-	-	-	DAU	15.788.065	Kecamatan Sebawi

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi 2021-2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Sambas serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2025.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi Tahun 2025, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut di atas, kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya kompetensi personil. Adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui perubahan anggaran sub kegiatan tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan dijadikan evaluasi tahun anggaran berikutnya.

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Pemerintah Kecamatan Sebawi menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sebawi Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 menjelaskan :

1. Prioritas pembangunan yang akan menjadi titik berat pembangunan Tahun 2025 dengan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, dan lokasi.
2. Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah.
3. Seluruh kebijakan pembangunan pada tahun 2025 dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan termasuk perkiraan pagu indikatif APBD yang diperlukan untuk pendanaannya.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Langkah-langkah persiapan mulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. Selanjutnya Camat dan penyelenggara pemerintah Kecamatan Sebawi akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja

Tahun 2025. Dalam kaitan itu maka seluruh lembaga pemerintah maupun swasta serta masyarakat yang menjadi bagian wilayah Kecamatan Sebawi perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Bahwa pelaksanaan atau realisasi dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi pada tahun-tahun sebelumnya telah dapat direalisasikan secara baik dengan prinsip *service excellent*, yaitu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Sebawi.
- b. Alokasi APBD Kabupaten Sambas untuk Kecamatan Sebawi selama ini belum dapat menyentuh semua kebutuhan masyarakat, antara lain disebabkan karena Kecamatan Sebawi bukan merupakan pelaksana semua kegiatan fisik langsung ke masyarakat.
- c. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan Sebawi Tahun 2025 merupakan acuan bagi pegawai di lingkungan pemerintah Kecamatan Sebawi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seksi-seksi maupun kasubbag-kasubbag di sekretariat serta pegawai/karyawan yang ada di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sebawi berkewajiban untuk melaksanakan program-program Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan Sebawi Tahun 2025 dengan sebaikbaiknya.
2. Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan Sebawi Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing seksi-

seksi, maupun kasubbag-kasubbag di sekretariat Pemerintah Kecamatan Sebawi perlu menyusun rencana operasionalisasi sub kegiatan kerja tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
 - b. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
1. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Selain itu masyarakat luas dapat juga berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan/sub kegiatan dalam program-program pembangunan.
 2. Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap seksi-seksi dan kasubbagkasubbag di sekretariat Pemerintah Kecamatan Sebawi wajib melakukan evaluasi pelaksanaan sub kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran sub kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Rencana tindak lanjut dari program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah Kecamatan Sebawi adalah

1. Tetap mengedepankan prinsip pemerintahan yang baik (*good government*) dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan berwibawa untuk peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Sebawi,
2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

3. Perlu peningkatan kapasitas SDM kepala seksi dan subbagian agar tertib administrasi sub kegiatan, sehingga memudahkan pengukuran kinerja untuk dijadikan evaluasi oleh pimpinan di atasnya dalam peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun berikutnya.
4. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang.
5. Dalam rangka sinergitas perencana harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
7. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi ini disusun dalam konsep sederhana dengan harapan dapat memberikan pedoman dan gambaran nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dan kontribusi yang positif dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja Perangkat daerah Kecamatan Sebawi tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai di Perangkat daerah Kecamatan Sebawi serta partisipasi aktif seluruh stakeholder terkait.

Sebawi, Desember 2024

CAMAT SEBAWI



SAMIRI, S.Pd., M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 198902 1 004